

Gagasan Adaptabel Al-Farabi dalam Politik Kenegaraan

Yogi Prana Izza
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: zherifzizi@gmail.com

Abstract : *Al-Farabi was the great philosopher and known as the Second Master (al-Mu'allim at-Thani). The main characteristics of his philosophy is political. This is because almost all the objectives of al-Farabi's philosophy is political. So it could be inappropriate to understand the philosophy of al-Farabi regardless of the political angle. The idea of al-Farabi on the al-Madina al-Fadhilah is the representation of political philosophy that got special attention. Because all lines of philosophical themes contained in the concept of al-Madina al-Fadhilah, namely the theological angle, system or methodology and behavior. In addition, al-Farabi's last essay is "Ara 'Ahl al-Madina Fadhilah". So what is contained in a politically charged book is a description of recent opinion. And the ideas of his political philosophy is still very revelan to be transformed into a government system of Indonesia today.*

Keyword : *al-Farabi, al-Madinah al-Fadhilah, politik kenegaraan.*

Pendahuluan

Gagasan membangun pemerintahan yang ideal dengan basis penduduk mayoritas muslim, telah diusung oleh banyak pemikir Islam. Namun agaknya, konsep *al-Madinah al-Fadhilah* yang pernah ditawarkan oleh filsuf besar al-Farabi – dalam batas tertentu – lebih relevan untuk dikaji ulang dewasa ini. Setidaknya, ada dua alasan yang melatarbelakangi relevansi kaji-ulang gagasan al-Farabi :

Pertama, Al-Farabi adalah tokoh cendekiawan muslim yang berupaya memadukan produk Timur (Islam) dan Barat. Ide-ide cemerlang Al-Farabi tentang politik kenegaraan didasarkan kepada sinergi antara khazanah Yunani kuno - khususnya yang terdapat pada Plato dan Aristoteles - dan khazanah Islam politik yang teralisasi melalui Daulah Islamiyah dan Syariat Islam. Hal ini tentu saja menarik, sebab sebuah adigium mengatakan bahwa : " Timur adalah Timur, dan Barat adalah Barat, keduanya tidak bisa disatukan !".

Padahal, jika ditelusuri dengan seksama, negara-negara Timur (Islam) dengan mayoritas penduduknya muslim dewasa ini tak mampu menghindari arus global sistem Barat yang pelan-pelan telah menancapkan kukunya. Dalam perbankan dan ekonomi misalnya, sistem yang digunakan masih berbasis konvensional. Atau dalam pola pemerintahan, demokrasi adalah "dewa" yang selalu diagung-agungkan.

Kedua, ide-ide tentang politik dan pemerintahan yang tertuang dalam buku Al-Farabi seperti *Ara' Ahl Madinah al-Fadhilah* , *al-Siyasah al-Madaniyah* , dan *Fusulun Muntaziatun*, dipaparkan cukup detail dengan segala keistimewaannya dibandingkan dengan karya Plato dalam Republik-nya. Jika Plato dalam Republik-nya hanya menerangkan sistem negara dalam jumlah penduduk yang ketika itu hanya mencapai 400.000 jiwa, maka secara wajar gagasan Al-Farabi tidak terpaku pada wilayah tertentu seperti halnya Plato.

Indikasi ini bisa kita baca dalam pembagian Al-Farabi tentang komunitas manusia (Masyarakat) berdasarkan statistik jumlah individu dalam konsep kenegaraan. Menurut Al-Farabi, komunitas manusia dalam konsep ketata-negaraan dibagi menjadi tiga golongan; masyarakat dalam jumlah yang besar, tengah-tengah dan kecil. Masyarakat dalam jumlah yang besar adalah komunitas manusia yang terdiri dari berbagai etnis yang bekerja sama demi mencapai kemaslahatan bersama. Masyarakat ini disebut sebagai Ummah. Kemudian disusul dengan tingkatan tengah-tengah dengan jumlah komunitas manusia yang lebih kecil dalam suatu wilayah yang lebih kecil pula. Sedangkan terakhir adalah komunitas manusia dalam jumlah paling kecil yang menempati suatu wilayah geografis tertentu. Tingkatan terkecil inilah yang oleh Al-Farabi dinamakan dengan Madinah. Dengan kata lain, Madinah menurut Al-Farabi adalah sebuah "negara kecil".¹

Jelas sekali bahwa Al-Farabi disini membagi negara menjadi dua : Negara Internasional (*al-daulah al-alamiyah*) dan negara nasional. Negara Internasional merupakan presentasi dari Daulah Islamiyah dalam sejarah Islam Politik. Sedangkan Negara Nasional atau *Madinah* adalah "negara bagian" dari sistem Khilafah Islamiyah atau Daulah Islamiyah ketika itu. Oleh karenanya, Al-Farabi lebih terperinci dalam menyampaikan gagasannya dibandingkan Plato, meski tak dapat dinafikan bahwa ia terpengaruh oleh murid Socrates ini. Dan tentunya, gagasan Al-Farabi tentang tata negara dan kemasyarakatan, dibandingkan dengan Plato, lebih sesuai untuk ditransformasikan dan diterapkan diabad 21 ini.

Masyakarat *al- Madinah al-Fadhilah* dan Masyarakat Non- *al-Madinah al-Fadhilah*

Al-Farabi dilahirkan ditengah carut-marut politik, pertikaian aliran agama, dan instabilitas sosial pada masa dinasti Abbasiyah. Ia bernazar untuk mengembalikan penyatuan pola pikir dan bangsa sekaligus serta menata berbagai ketidak teraturan dengan konsep sebuah negara yang memiliki sistem yang baik.² Maka lahirlah konsep *al-Madinah al-Fadhilah* atau bisa disebut sebagai "Negara Unggul", yaitu sebuah negara yang terdiri dari masyarakat yang unggul pula. Masyarakat ini berkumpul demi menggapai kebahagiaan hakiki. Barangkali contoh masyarakat unggul ini dalam sejarah sosiologi Islam adalah Masyarakat Madinah pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw.

Masyarakat di Madinah dibentuk berdasarkan landasan iman dan cinta, yang tentunya melebihi solidaritas kesukuan. Sukuisme yang menjadi ciri khas masyarakat Arab ketika itu menjadi lebur oleh iman dan cinta.³ Atas dasar iman dan akidah, maka seorang istri atau anak bisa menjadi musuh selama menghalangi perjalanan Islam dan pelaksanaan syariatnya. Hal ini disinyalir dalam Al-Qur'an : " *Hai orang-orang beriman, sesungguhnya diantara isteri-isteri dan*

¹ al-Farabi, *as-Siyasah al-Madaniyah* (Tahqiq, Ta'dim wa Ta'liq Dr Fauzi Najjar), Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1964. hal 39

² Muhammad Ali Abu Rayyan, *Tarikh al-Fikr al-Falsafi fil Islam*, Dar Nahdhah al-Arabiyah, Mesir 1977 hal 75

³ Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani ; Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Gema Insani, Jakarta 1999 hal 92.

anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka " (al-Taghobun : 14). Adapun landasan cinta didasarkan kepada hadis Nabi Saw : " Perumpamaan orang mukmin, dalam cinta, kasih-sayang, seperti satu badan, Jika ada anggota badan yang sakit, maka seluruh badan akan merespons dengan kesiagaan dan demam ". (HR Muslim)

Oleh karenanya masyarakat Madinah selalu bergerak progresif dan dinamis. Siapapun atas dasar satu akidah boleh bergabung tanpa harus membedakan ras dan warna kulit. Pondasi cinta juga membebaskan masyarakat Madinah dari sifat egoisme dan meraih keuntungan pribadi. Sehingga tidak tercipta konflik kelas atau status sosial seperti yang jamak terjadi dalam masyarakat modern saat ini.

Demikian kira-kira protipe secara umum masyarakat Madinah Al-Fadhilah yang diinginkan Al-Farabi. Ia pernah menyatakan dalam bukunya *Ara' Ahl Madinah al-Fadhilah* bahwa elemen-elemen beserta tingkatan-tingkatan yang terdapat dalam Madinah Al- Fadhilah saling terikat satu sama lain. Ikatan ini bernama cinta (*al-Mahabbah*) dan dikuatkan dengan keadilan (*Al-adl*)⁴.

Bandingkan dengan lawan prototipe masyarakat Madinah yang oleh Al-Farabi disebutkan diantaranya ; *Madinah Al-jahilah* dan *Madinah Al-Fasiqa*⁵. Madinah Al- Jahilah adalah kebalikan Madinah Al-Fadhilah. Orientasi hidup masyarakat yang bernaung dalam negara ini hanyalah kenikmatan duniawi semata-mata. Oleh karena itu, seperti kata Al-Farabi, mereka tidak mengenal (buta) peraturan dan undang-undang yang bisa mengatur kebahagiaan bersama. Barangkali contoh masyarakat tipe Al-jahilah ini adalah masyarakat Jahiliyah sebelum Islam. Perilaku yang dominan ditengah-tengah masyarakat ialah perilaku menyimpang semacam pesta minuman keras, perzinahan, pembunuhan, pelecehan wanita, penyiksaan terhadap budak dan bentuk-bentuk tindak criminal lainnya.

Adapun masyarakat *Madinah al-Fasiqo* adalah masyarakat yang melek politik, peraturan dan undang-undang. Namun demikian, undang-undang dan peraturan hanyalah tinta diatas kertas, tak ada aplikasi riil dari masyarakat ini. Didalamnya, seperti istilah Hasan Hanafi⁶ korupsi meraja lela, pencurian, perampasan dan pencucian uang serta berbagai kejahatan sosial lainnya tumpah ruah. Oleh karenanya karakter dari masyarakat *Madinah Al-Fasiqa* ini adalah gabungan dari dua tipe masyarakat *Madinah Al-Fadhilah* dan Masyarakat *Al- Jahilah*.

Peran Pendidikan

Al-Farabi menitik beratkan fungsi dan peran Pendidikan sebagai pembentukan karakteristik masyarakat Madinah Al-Fadhilah yang *melek* politik, peraturan, undang-undang, dan moral. Ia mengatakan bahwa : " seorang raja (pemimpin) adalah pendidik dan pengajar umatnya,

⁴ Al-Farabi , *Fusulun Muntaziatun* (Tahqiq, Takdim, wa Ta'liq), Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1971.hal 71-73

⁵ al-Farabi, *Ara' Ahl Madinah al-Fadhilah* (Tahqiq wa Takdim Al-Bier Nadir) Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1959 hal 78-79 dan al-Farabi, *as-Siyasah al-Madaniyah* hal 59-77.

⁶ .Hasan Hanafi Minal Madinah al-Fadhilah ila ad-Daulah al-Amniyah (makalah) TT.

sebagaimana kepala rumah tangga yang berperan sebagai pendidik pengajar anggota keluarga ".⁷ Maksud dari perumpamaan yang digunakan Al-Farabi dalam pendidikan ini adalah sebuah sistem yang bergerak secara dinamis. Sistem pengajaran yang mampu mengatur dan merapikan lembaga-lembaga pendidikan beserta unit-unitnya.

Al-Farabi menekankan sistem ini berdasarkan profesi para pengajar. Masyarakat yang menginginkan pendidikan secara sukarela ditangani oleh para pendidik khusus. Demikian juga masyarakat yang perlu pendidikan namun enggan untuk dididik, maka pemimpin memaksa mereka untuk dididik oleh para pendidik yang memang sudah disiapkan untuk menghadapi tipe-tipe orang yang harus dididik secara paksa.

Pendidikan bagi Al-Farabi memegang kunci utama. Sebab tanpa pendidikan, tujuan utama yaitu menggapai kebahagiaan (*al-Saadah*) akan sulit terwujud. Itu sebabnya, bagi Al-Farabi seorang pemimpin harus benar-benar bisa memilih para pengajar handal, yang menurutnya secara kodrati tidak dimiliki semua orang. Oleh karenanya Al-Farabi juga membayar jasa-jasa dengan imbalan materi bagi orang-orang yang "berprofesi" sebagai pendidik ilmu umum dan penyuluh akhlak masyarakat. Para pendidik, lebih-lebih para penyuluh, tidak mampu menghasilkan barang yang bisa diganti dengan uang. Mereka seringkali tidak punya waktu untuk bekerja menghasilkan materi.

Barangkali para penyuluh akhlak ini dimisalkan dengan *Ahlu Suffah* pada masa Rasulullah Saw. Ahlu Suffah kurang lebih berjumlah 300 orang. Mereka intens memperdalam ilmu dan beribadah. Namun demikian mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial dan jihad⁸. Banyak diantara mereka yang syahid dimedan perang, diantaranya adalah Syafwan bin Baida, Zaid bin Khattab, Khubaib bin Yasaf dsb. Hanya saja secara ekonomi mereka sangat kekurangan. Sehingga tak jarang diantara mereka ketika sedang sholat tiba-tiba terjatuh karena lemah fisik. Mereka tidak pernah meminta-minta. Rasulullah Saw dan para dermawanlah yang acapkali menopang kehidupan ekonomi mereka. Seperti, jika ada makanan, mengajak makan bersama.

Para Ahlu Suffah tidak pernah dituntut untuk bekerja lebih, karena mereka hakekatnya "pelestari" ilmu-ilmu yang diberikan Rasulullah Saw. Perhatian besar mereka terhadap ilmu seringkah tidak memberikan ruang yang cukup untuk sekedar bekerja mencari penghidupan. Sehingga membutuhkan uluran tangan para dermawan. Suatu hal yang tak jauh beda dengan para penyuluh dan pengawal moral agama pada Madinah Al-Fadhilah milik Al-Farabi.

Dengan demikian, Al-Farabi menilai bahwa seorang pemimpin, selain pengatur juga seorang pendidik yang handal. Karena ia tidak hanya mendelegasikan kepada orang-orang profesional dihidangnya, akan tetapi ia juga dituntut untuk memahami dunia pendidikan guna

⁷ Al-Farabi, *Tahshiil as-Sa'adah* (Tahqiq, Ta'dim wa Ta'liq Dr Fauzi Najjar), Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1964. hal 31.

⁸ Akram Dhiyauddin Umari, Op.cit

mengatur sistem bagi para pendidik. Jadi, seorang pemimpin sejatinya adalah juga seorang pendidik dalam skala yang lebih luas.

Sampai disini sebenarnya ada kendala yang menghadang ; yaitu bagaimana memilih pemimpin yang dalam kacamata Al-Farabi sedemikian ideal dan sempurna itu ?.

Demokrasi Menurut Al-Farabi dan Problem Kepemimpinan

Masyarakat *Madinah Al-Fadhilah* adalah masyarakat demokratis. Artinya dalam bertindak mereka selalu menghormati sesama demi tercipta kebahagiaan bersama. Sedangkan pemimpin "negara unggul" ini adalah benar-benar *al-insan al-fadhil*, yaitu pemimpin yang unggul dan kapabel dalam mengatur masyarakat. Namun demikian, sistem pemilihan kepemimpinan ini menyisakan masalah bagi Al-Farabi seperti disinggung diatas.

Al-Farabi menilai tercela sebuah demokrasi, ⁹ sekalipun sistem ini menawarkan solusi paling baik dibandingkan sistem lainnya. Sebab acapkali demokrasi tidak menghasilkan seorang pemimpin yang paling unggul dan kapabel (*al-insan al-fadhil*). Demokrasi, menurut Al-Farabi, hanya hasil dari kehendak (nafsu) rakyat. Sementara kehendak Rakyat ini bisa dibeli dengan uang. Artinya, sebuah kepemimpinan bisa dibeli.

Padahal pemimpin yang unggul - akan diterangkan pada pembahasan selanjutnya - adalah satu-satunya yang mampu membawa masyarakat menuju kebahagiaan dengan jalan membungkam kehendak-kehendak atau nafsu-nafsu serakah duniawi. Namun demikian Al-Farabi tidak memberikan solusi kongkrit sebagai pengganti asas demokrasi ini sebagai sebuah sistem. Sedangkan Bapak Sosiologi Islam, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Pemerintah adalah jelmaan dari maslahat holistik. Standar maslahat umum ini dipegang oleh umat (*al-Ummah*) . Yang penting disini adalah bahwa masyarakat mempunyai sistem yang baik. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai pelaksana, pengawas dan penjaga kepentingan umum yang telah dipercayakan umat ¹⁰.

Hanya saja, justeru dengan sistem seperti ini Ibnu Khaldun berpendapat bahwa format sebuah pemerintahan ideal adalah Monarki. Menerima sistem Monarki bagi Ibnu Khaldun tidak bertentangan dengan agama. Kadang-kadang boleh jadi tercipta kediktatoran dalam sistem monarki, namun demikian, hal itu dianggap wajar.

Sepertinya Ibnu Khaldun tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya. Sebab seorang Raja, hanya bertanggung jawab terhadap Allah Swt, bukan kepada rakyat. Dengan demikian fungsi lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan tidak mendapatkan tempat. Problem yang selalu menghadang para pemikir Islam adalah kepemimpinan. Karena baik Al-Farabi, maupun Ibnu Khaldun, sama-sama menitik beratkan kepada seorang pemimpin. Bahkan khusus untuk pemegang pucuk sebuah pemerintahan atau negara, Al-Farabi terlalu nampak idealis sebagaimana yang akan dibahas berikut ini.

⁹ Muhammad Khotami, *ad-Din wal Fikr Fii Syirok al-Istibdad* : Jaulah Fi Fikr as-Siyasi Lil Muslimin, 2002 hal 33

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Muqoddimah*, Darul Fikr, Bairut, 2002 hal 96

Teori Piramida ; Konsep Kepemimpinan dan Tingkatan Masyarakat

Al-Farabi mengemukakan bahwa Madinah Al-Fadhilah seumpama badan yang sehat dan sempurna. Dan setiap anggota badan ini mempunyai tabiat serta keistimewaan dan keunggulan yang berbeda-beda. Setiap anggota badan ini saling membantu berdasarkan sistem simbiosis-mutualisme. Namun demikian, ada satu anggota badan yang berfungsi sebagai penggerak utama yaitu hati (*al-Qolb*). *Al-Qolb* disini adalah analogi dari seorang pemimpin (*al-ra'is*)¹¹.

Perumpamaan ini mirip dengan Hadis Nabi Saw. yang telah dikemukakan diatas bahwa seorang mukmin laksana satu jasad. Sedangkan perumpamaan hati sebagai pemimpin sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa didalam tubuh ada seonggok daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh, namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan, seonggok daging ini adalah hati (*al-Qolb*).

Teori Al-Farabi tentang kepemimpinan dan masyarakat ini semacam teori Piramida. Dalam format piramida seorang pemimpin berada di pucuk singasana. Sementara secara menurun, ia ditopang oleh bawahannya yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin dengan berbagai kelebihan masing-masing hingga lapisan masyarakat paling bawah. Al-Farabi berpendapat bahwa setiap orang dibekali kemampuan secara naturnya oleh Allah secara berbeda-beda. Bakat kepemimpinan menurut Al-Farabi tidak dimiliki semua orang. Hanya segelintir orang yang secara "kodrati" akan menjadi pemimpin.¹²

Pemimpin yang berada pada puncak sebuah paramida adalah pemimpin dengan kedaulatan penuh ditanganya. Pemimpin ini memiliki segala kelebihan atau yang terbaik. Sebab setiap elemen masyarakat dalam sebuah komunitas mempunyai seorang pemimpin sendiri-sendiri.

Oleh karenanya Al-Farabi membagi masyarakat menjadi dua golongan ; golongan orang-orang terpilih dan golongan masyarakat biasa. Al-Farabi mengemukakan bahwa ada manusia yang diciptakan hanya sebagai pelayan. Artinya ia tidak punya "hak" untuk menjadi pemimpin. Pada intinya, Al-Farabi menghendaki bahwa masyarakat Madinah Al-Fadhilah adalah masyarakat yang bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing secara kodrati dan bekerja sama untuk merealisasikan kebahagiaan.¹³

Oleh karenanya Al-Farabi pernah membagi elemen-elemen masyarakat dalam *Madinah Al-Fadhilah* menjadi enam bagian berdasarkan kemampuan : *al-Afadhil* (orang-orang yang unggul) yaitu para ahli hikmah atau filsuf (*hukama*) dan para konseptor dalam masalah-masalah besar, *Dzawul Alsinah* (orator) dan pembawa ajaran agama (*hamalah al-din*). Golongan ini adalah para khotib, para penyair, musikus, penulis dan yang semisalnya. Kemudian adalah *al-muqoddirun*. Mereka merupakan para profesional semisal bankir, akuntan, insinyur, dokter dan semisalnya. Selanjutnya adalah *al-mujahidun* (para perjuang) yaitu semisal tentara, polisi dan

¹¹ Al-Farabi, *Ara' Ahl Madinah al-Fadhilah* hal 118-119.

¹² . Ibid hal 122.

¹³ . ibid hal 118

profesi yang serupa. Ada pula *al-maaliyun* yaitu orang-orang yang menghasilkan uang di Madinah Al-Fadhilah ini semisal petani, penggembala, pedagang dan semisalnya.

Al-Farabi memasukkan unsur ketuhanan dalam memaknai sebuah kepemimpinan. Ia mengatakan bahwa sistem perputaran alam (kosmos) berjalan menurut kehendak "sebab pertama" yaitu Tuhan. Demikian juga Madinah Al-Fadhilah. Dengan segala perangkatnya ia mengikuti kehendak pemimpinnya secara tertib, sebab sebagaimana dikemukakan diatas, seorang pemimpin mempunyai kedaulatan dan kekuasaan mutlak.¹⁴

Idealisme Al-Farabi tentang seorang pemimpin dalam Madinah Al-Fadhilah ini memang nampak berlebihan. Akan tetapi tujuan Al-Farabi barangkali memperketat seleksi atas kepemimpinan. Karena, untuk mewujudkan masyarakat dalam naungan al-Madinah al-Fadhilah diperlukan pemimpin yang benar-benar kapabel. Setidaknya ada 12 syarat yang harus dipenuhi untuk memegang pucuk kepemimpinan Madinah Al-Fadhilah diantaranya adalah :

1. Tidak cacat.
2. Secara alami punya kemampuan memahami dan memandang dengan baik.
3. Mempunyai daya hafalan yang baik.
4. Mempunyai kecerdasan yang baik.
5. Pandai retorika.
6. Mencintai Ilmu dan bisa memanfaatkannya.
7. Kejelekan baginya adalah semua kenikmatan ragawi seperti makan, minum dan berhubungan badan.
8. Mencintai kejujuran dan orang-orang yang jujur dan membenci dusta berikut para pelakunya.
9. Mempunyai jiwa yang besar dan mencintai kehormatan.
10. Memandang kecil harta benda dan segala kenikmatan duniawi.
11. Secara alami mencintai keadilan dan para pelakunya dan membenci kezaliman dan ketidakadilan berserta para pelakunya.
12. Memiliki jiwa yang kokoh dan bukan seorang penakut.

Sungguhpun demikian, Islam secara tidak langsung sudah mensinyalir dalam Al-Qur'an bahwa kepemimpinan haruslah bersifat kolektif. Didalam surat An-Nisa' ayat 59 disebutkan : "wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri diantara kamu ". Kata "*ulil amri*" menggunakan bentuk jamak (plural) bukan "*waliyul amri*" (tunggal). Ini artinya tidak ada monopoli atau kediktatoran dalam kekuasaan, kepemimpinan dan pengambilan kebijaksanaan. Pemimpin tetap satu, namun demikian otoriter tidak diperbolehkan

¹⁴ . Muhammad Abdul Mu'iz Nashr, *al-Farabi wa Nudzum al-Hukm fii al-Qorni al-Ishriin*, al-Haiah al-Ammah al-Misyriyyah, 1983 hal 232.

dalam Islam. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Dan Ulil Amri ini haruslah sebagaimana dalam ayat tersebut, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya.¹⁵

Penutup

Secara kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu berdiri sendiri, oleh karenanya ia tidak mungkin menggapai kesempurnaan (kebahagiaan) tanpa bergabung dan berafiliasi dalam bentuk perkumpulan yang disebut sebagai masyarakat. Diantara konsep dan gagasan filsafat politik kenegaraan Al-Farabi yang bisa ditransformasikan ke arah riil adalah :

konsep cinta (*al-mahabbah*). Konsep ini dijelaskan dengan Hadis Nabi Saw yang sudah diterangkan diatas. Atas dasar cinta inilah akan tercipta masyarakat yang saling tolong menolong dan bekerja sama secara dinamis.

konsep keadilan (*al-adl*). Guna menopang konsep cinta diperlukan keadilan. Sebagaimana yang disinyalir Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' : " *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...* " (an-Nisa' :58).

konsep kepemimpinan. Keadilan yang disebutkan ayat diatas, hakikatnya adalah berkaitan dengan kepemimpinan (*ulil amri*). Para pemimpin itu dituntut untuk mengadakan MoU dengan rakyatnya. Butir-butir kesepakatan itu adalah para pemimpin untuk menjalankan amanat yang dibebankan kepadanya serta berlaku adil. Sementara rakyat mentaati para pemimpin yang adil itu. Dan untuk mendapatkan pemimpin yang unggul diperlukan sistem yang bisa menghasilkan seorang pemimpin yang kapabel.

konsep pendidikan. Pendidikan merupakan tulang punggung penyadaran masyarakat. Tanpa gerakan pendidikan, masyarakat muslim yang ideal akan sulit direalisasikan.

konsep kemampuan kodrati. Setiap orang memiliki kelemahan dan keistimewaan sendiri-sendiri. Diharapkan setiap orang mengetahui keistimewaan dan kelemahannya. Jika bidang garapan yang cocok bagi seseorang adalah mengajar misalnya, ia diharapkan untuk tidak memaksakan diri menjadi seorang pengusaha. Demikian sebaliknya Sehingga diharapkan akan tercipta tatanan masyarakat yang proporsional. Pada intinya, ia menawarkan gagasan spesialisasi bidang garapan. Dengan lima konsep diatas, diharapkan format negara dan pemerintahan Islam yang ideal setidaknya bisa dirancang, meski dalam bentuk yang "mentah".

Daftar Pustaka

- Al-Farabi, Abu Nasr, *Ara' Ahlul Madinah Al-Fadhilah*, (Tahqiq wa Takdim Al-Bier Nadir)
Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1959
- _____, *As-Siyasah Al-Madaniyah*, (Tahqiq, Ta'dim wa Ta'liq Dr Fauzi Najjar),
Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1964

¹⁵ . Muhammad Imaroh, *Suquthu al-Ghuluw al-'Imaniyy*, Dar as-Syuruuq, Mesir, 1995 hal 155

- _____, *Fusulun Muntaziatun* (Tahqiq, Takdim, wa Ta'liq), Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1971
- _____, *Tahsiil as-Sa'adah* (Tahqiq, Ta'dim wa Ta'liq Dr Fauzi Najjar), Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1964
- Hanafi, Hasan, *Minal Madinah Al-Fadhilah ila ad-Daulah al-Amniyah* (makalah TT).
- Husayn Ataya et.al, *Al-Farabi wa al-Hadloroh al-Insaniyah*, 1976
- Imarah, Muhammad, *al-Islam wa Siyasah*, Cetakan pertama, Dar as-Salam, Kairo, 2005
- _____, *Suquthu al-Ghuluw al-'Ilmani*, Dar as-Syuruq, Kairo, 1995
- Khaldun, Ibnu *Muqoddimah*, Dar el-Fikr, Bairut, 2002
- Khomeini, Imam *Al-Hukumah Al-Islamiyah* (l'dad wa Takdim : Dr Hasan Hanafi) 1979.
- Khomeini, Imam, *Jihadu Nafsi au al-Jihad al-Akbar* (l'dad wa Takdim : Dr Hasan Hanafi) TT.
- Al-Kitab at-Tidzkari, *Abu Nasr al-Farabi Fii ad-Dzikra al-Fiyah Li Wafatihi 950 M* (Pengantar Dr Ibrahim Madkur), Al-Majlis al-A'la Lis-Tsaqofah, Kairo, 1983.
- Mahmud, Abdul Halim, *al-Ta'fikir al-Falsafi fii al-Islam*, Dar al-Maarif, Kairo.
- Umari, Akram Dhiyauddin, *Masyrakat Madani* (terj), cetakan pertama, Gema Insani Press, Jakarta 1999.